

## ABSTRAK

### TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN HARTA BENDA SESEORANG YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Oleh : Dzikry Khafifullah Syakbana

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M. H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Perampasan harta benda yang menyebabkan kematian, masalah hukum yang kompleks muncul dalam menentukan tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pelaku bisa dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang perlu dicermati secara seksama. Seiring dengan evolusi masyarakat dan tuntutan akan keadilan yang semakin tinggi, perlu adanya peninjauan dan pembaharuan terhadap peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab pidana pelaku perampasan harta benda yang berujung kematian.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan Tindak Pidana Perampasan Harta Benda Seseorang dan Bagaimana Tanggungjawab Pidana Terhadap *pleger* dan *doen pleger* Perampasan Harta Benda yang mengakibatkan matinya seseorang. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Korban kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan dan dalam pengertian yang luas korban kejahatan bukan saja keluarga dan teman korban tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok. Sejalan dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam kasus ini perampasan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, baik *doen pleger* (penyuruh) maupun *pleger* (eksekutor) dipidana dengan kurungan selama delapan tahun (pasal 354 ayat 1). Bila mengakibatkan kematian dipidana dengan kurungan paling lama sepuluh tahun (pasal 354 ayat 2 KUHP).

.Perlunya bentuk perlindungan antara lain seperti Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Pemberian Konseling, Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pemberian informasi adalah Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya. Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Kejahatan, Perampasan Harta Benda, Kematian.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST CRIME PERSONS FOR THE CRIME OF CONFISCATION OF SOMEONE'S PROPERTY THAT RESULTS IN DEATH**

By : Dzikry Khafifullah Syakbana  
Main Advisor : Dr. Zainuri, S.H., M. H.  
Supervising Lecturer : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

*Confiscation of property that causes death, complex legal issues arise in determining criminal responsibility for the perpetrator. The fundamental question regarding the extent to which perpetrators can be held responsible for criminal acts that result in the loss of a person's life needs to be carefully examined. Along with the evolution of society and demands for justice that are increasingly high, there is a need to review and update the legal regulations that regulate the criminal responsibility of perpetrators of property confiscation that results in death.*

*The formulation of the problem of this thesis is how to protect crime victims of the crime of confiscation of someone's property and what are the sanctions for perpetrators of the crime of confiscation of property which results in someone's death. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution to the problem formulation.*

*The research method in writing this thesis is normative using a legislative approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.*

*Crime victims have a functional role in the occurrence of crime and in a broad sense crime victims are not only the victim's family and friends but also legal entities and business entities, groups. In line with this, countermeasures are needed to ensure order in society. From a legal perspective, efforts in this case are realized by criminal law. In this case of robbery and abuse which resulted in injuries, both doer pleger (executor) and pleger (executor) were punished with imprisonment for eight years (article 354 paragraph 1). If it results in death, he will be punished with a maximum imprisonment of ten years (article 354 paragraph 2 of the Criminal Code).*

*The need for forms of protection include, among others, providing restitution and compensation, providing counseling, medical services/assistance, legal assistance, providing information, namely providing information to victims or their families. Law enforcement officials must provide strict sanctions against perpetrators of these crimes in accordance with applicable laws and regulations.*

**Keywords :** *Crime, Confiscation of Property, Death.*